



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : IKHLAS
- 2. Jabatan : PANITERA
- 3. NHK : 670063

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.609.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/120 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 1410 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000		
3. Tanah Seluas 3768 m2 di KOTA BIMA , WARISAN Rp. 170.000.000		
4. Tanah Seluas 984 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000		
5. Tanah Seluas 16690 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
6. Tanah Seluas 467 m2 di KOTA BIMA , WARISAN Rp. 71.000.000		
7. Tanah Seluas 961 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 75.500.000		
8. Tanah Seluas 7775 m2 di KOTA BIMA , WARISAN Rp. 82.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	9.000.000
1. MOTOR, HONDA NF100 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 1KPA/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	22.114.778
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----



Sub Total	Rp.	1.640.114.778
III. HUTANG	Rp.	328.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.312.114.778

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.